



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 31 Oktober 2022

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR: 903/ 0723 /BAKUDA/TAPD

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, agar Saudara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. PEDOMAN PENYUSUNAN RKA

Dalam penyusunan RKA-SKPD agar mempedomani :

1. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD;
2. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
4. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
5. Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### II. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :

1. Rencana pendapatan memuat kelompok, jenis, objek dan satuan terkecil rincian objek pendapatan yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Rencana Belanja memuat kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja;


3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek pembiayaan;
4. Menjamin ketersediaan gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan tambahan penghasilan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan akhir tahun anggaran 2023;
5. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
6. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022 di rencana formasi tahun 2023;
7. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
8. Penganggaran tambahan penghasilan dianggarkan 13 bulan sebesar pagu anggaran tahun 2022;
9. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
10. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud dengan memperhatikan Standar Satuan Harga;
11. Belanja perjalanan dinas terdiri dari :
  1. Belanja perjalanan dinas dalam negeri :
    - a. Belanja perjalanan dinas biasa,
    - b. Belanja perjalanan dinas tetap,
    - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota,
    - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota,
    - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota,
  2. Belanja perjalanan dinas luar negeri  
Di anggarkan dengan mempedomani standar harga satuan.
12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dapat dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD;
13. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - a. Hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. Penghargaan atas suatu prestasi;
  - c. Beasiswa kepada masyarakat;
  - d. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek;

15. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
  - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan
  - c. Batas minimal kapitalisasi aset.
16. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
17. Penganggaran Belanja Modal agar menggunakan sistem *full costing*.  
Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga belanja aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan (*full costing*), seperti:
  - a. Biaya transportasi, biaya uji coba dan lain-lain.
  - b. Belanja perjalanan dinas dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya.
  - c. Biaya konsultan perencana, konsultan pengawas dan pengembangan perangkat lunak (software) harus ditambahkan pada nilai perolehan.
18. Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Untuk penganggaran gaji pegawai honorer/PHL dengan klasifikasi jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan kantor, dan jasa tenaga pengemudi (sopir) di anggarankan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
20. Penyusunan rencana penarikan (anggaran kas), agar dapat dihitung sebagai berikut:
  - a. Triwulan I sebesar 20% dari total pagu anggaran SKPD.
  - b. Triwulan II sebesar 30% dari total pagu anggaran SKPD.
  - c. Triwulan III sebesar 35% dari total pagu anggaran SKPD.
  - d. Triwulan IV sebesar 15% dari total pagu anggaran SKPD.

### III. PENYAMPAIAN RKA

1. Format RKA SKPD terlampir ;
2. RKA-SKPD disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing:
  - a. 1 (satu) rangkap kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku PPKD;
  - b. 1 (satu) rangkap kepada Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk di review.
3. RKA SKPD tersebut sudah di input pada aplikasi SIPD dan paling lambat disampaikan hari Rabu tanggal 02 November 2022 pukul 13.00 Wib.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 903/ 0923 /BAKUDA/TAPD  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN TA 2023
1	DINAS PENDIDIKAN	521.476.620.139,00
2	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I	68.809.680.785,00
3	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II	32.058.050.443,00
4	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III	39.080.675.770,00
5	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV	32.532.169.893,00
6	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V	56.157.055.500,00
7	SMAN 1 PANGKAL PINANG	2.641.680.425,00
8	SMAN 2 PANGKAL PINANG	2.256.904.752,00
9	SMAN 3 PANGKAL PINANG	2.484.815.485,00
10	SMAN 4 PANGKAL PINANG	1.810.847.870,00
11	SMA N 1 BAKAM	583.886.880,00
12	SMAN 1 BELINYU	1.509.989.008,00
13	SMAN 1 PEMALI	2.155.943.440,00
14	SMAN 1 MENDO BARAT	1.308.543.050,00
15	SMAN 2 MENDO BARAT	743.951.615,00
16	SMAN 1 MERAWANG	1.229.253.599,00
17	SMAN 1 PUDING BESAR	969.129.528,00
18	SMA NEGERI 2 PUDING BESAR	496.769.240,00
19	SMAN 1 RIAU SILIP	1.205.000.000,00
20	SMAN 1 SUNGAI LIAT	2.480.704.865,00
21	SMAN 1 KOBA	1.860.954.463,00
22	SMAN 1 LUBUK BESAR	1.496.384.935,00
23	SMAN 1 NAMANG	1.430.999.190,00
24	SMAN 1 PANGKALAN BARU	1.446.493.088,00
25	SMAN 1 SUNGAI SELAN	921.188.585,00
26	SMAN 2 SUNGAI SELAN	1.516.979.125,00
27	SMAN 1 JEBUS	1.806.678.600,00
28	SMAN 1 KELAPA	1.731.886.280,00


29	SMAN 1 MUNTOK	1.982.135.900,00
30	SMAN 1 BP TERITIP	1.419.927.950,00
31	SMAN 1 TEMPILANG	1.174.920.511,00
32	SMAN 1 PARITTIGA	1.255.558.630,00
33	SMAN 1 AIRGEGAS	1.788.637.025,00
34	SMAN 1 LEPAR PONGOK	807.392.720,00
35	SMAN 1 KEP. PONGOK	441.729.788,00
36	SMAN 1 PAYUNG	1.639.099.700,00
37	SMAN 1 SIMPANG RIMBA	1.018.578.144,00
38	SMAN 1 TOBOALI	2.378.267.680,00
39	SMAN 2 TOBOALI	1.368.214.600,00
40	SMA NEGERI 1 PULAU BESAR	540.072.900,00
41	SMAN 1 TANJUNG PANDAN	2.054.935.700,00
42	SMAN 2 TANJUNG PANDAN	1.825.520.000,00
43	SMAN 1 SIJUK	1.185.420.000,00
44	SMAN 1 MEMBALONG	1.352.480.000,00
45	SMAN 1 GANTUNG	1.851.920.000,00
46	SMAN 1 KELAPA KAMPIT	1.421.950.000,00
47	SMAN 1 MANGGAR	2.156.480.000,00
48	SMAN 1 SIMPANG PESAK	1.096.866.150,00
49	SMA Negeri 1 Damar	996.593.280,00
50	SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER	4.802.995.270,00
51	SMKN 1 PANGKALPINANG	2.273.981.895,00
52	SMKN 2 PANGKALPINANG	3.843.201.057,00
53	SMKN 3 PANGKALPINANG	2.107.359.175,00
54	SMKN 4 PANGKALPINANG	1.872.804.450,00
55	SMKN 5 PANGKALPINANG	1.060.661.875,00
56	SMKN 1 SUNGAILIAT	2.639.167.285,00
57	SMKN 2 SUNGAILIAT	1.979.541.880,00
58	SMKN 1 BELINYU	1.057.596.230,00
59	SMK N 1 BAKAM	962.214.945,00
60	SMKN 1 MENDOBARAT	678.982.880,00
61	SMKN 1 KOBA	1.410.582.337,00
62	SMKN 2 KOBA	1.887.168.836,00

63	SMKN 1 PANGKALAN BARU	2.430.481.985,00
64	SMKN 1 SIMPANG KATIS	2.502.000.000,00
65	SMK NEGERI 1 SUNGAI SELAN	511.999.143,00
66	SMKN 1 MUNTOK	1.423.185.300,00
67	SMKN 1 KELAPA	1.102.354.290,00
68	SMKN 1 TEMPILANG	969.466.906,00
69	SMKN 1 PARIT TIGA	2.067.699.492,00
70	SMKN 1 TOBOALI	1.880.388.060,00
71	SMKN 1 PAYUNG	1.031.776.500,00
72	SMKN 1 TUKAK SADAI	816.787.020,00
73	SMKN 1 AIRGEGAS	1.052.468.774,00
74	SMK NEGERI 1 PULAU BESAR	270.800.900,00
75	SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	599.398.308,00
76	SMKN 1 TANJUNGPANDAN	2.479.480.000,00
77	SMKN 2 TANJUNGPANDAN	2.162.100.000,00
78	SMKN 3 TANJUNGPANDAN	1.705.630.288,00
79	SMKN 1 BADAU	1.157.740.000,00
80	SMKN 1 SELAT NASIK	448.840.000,00
81	SMKN 1 MANGGAR	1.995.510.000,00
82	SMKN 1 KELAPA KAMPIT	806.240.000,00
83	SMK NEGERI 1 DENDANG	485.959.408,00
84	SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG	376.199.985,00
85	SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	406.224.728,00
86	SMK NEGERI 1 SIJUK	854.776.000,00
87	SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG	2.347.294.836,00
88	SLB N SUNGAILIAT	1.460.949.930,00
89	SLB N Koba	925.058.135,00
90	SLBN MUNTOK	751.464.857,00
91	SLB Negeri TOBOALI	854.379.120,00
92	SLB N TANJUNGPANDAN	1.346.480.000,00
93	SLBN Manggar	979.102.435,00
94	UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	5.575.223.400,00
95	SMAN 3 TOBOALI	248.522.038,00
96	DINAS KESEHATAN	73.920.598.948,00

97	UPTD BALAI LABOLATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	4.568.886.792,00
98	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	142.455.704.977,00
99	RUMAH SAKIT JIWA	61.051.596.500,00
100	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	221.393.602.049,00
101	UPT PENGAWASAN DAN PERALATAN PUPR	1.616.679.380,00
102	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.171.923.352,00
103	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.669.516.050,00
104	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	35.239.240.189,00
105	Kepala UPTD Pantli Sosial Bina Laras Hijrah	1.339.997.375,00
106	Kepala UPTD Pantli Sosial Bina Serumpun	1.133.996.704,00
107	DINAS TENAGA KERJA	20.308.145.806,00
108	UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA	822.000.000,00
109	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	15.120.063.119,00
110	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROV.KEP. BANGKA BELITUNG	48.397.000,00
111	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	51.213.647.881,00
112	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN	5.276.108.384,00
113	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN	1.133.994.010,00
114	PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	489.000.000,00
115	PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	287.999.601,00
116	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	47.432.470.241,00
117	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sigambir Kota Waringin	419.360.000,00
118	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Belantu Mendanau	846.450.000,00
119	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren	773.944.093,00
120	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Rambat Menduyung	533.370.000,00
121	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Jebu Bembang Antan	581.249.660,00
122	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bubus Panca	467.929.940,00
123	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sungai Sembulan	672.988.000,00
124	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Muntai Palas	675.631.694,00
125	UPTD Labolatorium Lingkungan	5.680.916.950,00
126	DINAS PERHUBUNGAN	28.627.769.282,00
127	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.150.025.949,00

128	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	16.942.680.209,00
129	UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.184.035.650,00
130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.458.883.401,00
131	UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung	814.046.320,00
132	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	39.950.058.181,00
133	UPTD Balai Pengembangan Pariwisata Wilayah Belitung DISBUDPAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.154.999.700,00
134	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.791.004.540,00
135	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.107.674.794,00
136	UPTD Balai pemuliaan ikan (BPI)	5.831.048.500,00
137	UPTD Laboratorium Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	518.764.375,00
138	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.748.613.676,00
139	Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung	379.449.100,00
140	Cabang Dinas ESDM Wilayah Belitung Timur	394.256.320,00
141	Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka	391.332.060,00
142	Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Barat	816.154.875,00
143	Cabang Dinas ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	418.493.060,00
144	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.093.149.603,00
145	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	999.379.256,00
146	UPTD RUMAH PROMOSI DAN KEMASAN	1.813.981.915,00
147	Biro Pemerintahan	3.994.390.230,00
148	Biro Kesejahteraan Rakyat	53.952.920.945,00
149	Biro Hukum	1.024.153.700,00
150	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	692.588.900,00
151	Biro Pengadaan Barang/Jasa	2.313.422.165,00
152	Biro Organisasi	862.556.600,00
153	Biro Umum	94.728.300.000,00
154	SEKRETARIAT DPRD	121.979.468.633,00
155	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	21.762.427.100,00
156	BADAN KEUANGAN DAERAH	556.975.702.194,00
157	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	1.125.760.615,00
158	UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	1.647.200.000,00
159	UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	1.382.941.393,00
160	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	2.054.377.525,00

161	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	2.332.409.747,00
162	UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	1.861.600.000,00
163	UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	1.442.897.400,00
164	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	30.343.455.486,00
165	BADAN PENGHUBUNG	13.968.112.948,00
166	INSPEKTORAT DAERAH	21.474.160.799,00
167	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.362.092.309,00

PI GUBENRUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
 DJAMALUDDIN